

**RENCANA KERJA TAHUNAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DEPOK**



**TAHUN ANGGARAN 2019
PERUBAHAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Tahun 2019 Perubahan dapat terselesaikan yang selanjutnya menjadi pedoman dan pengendali pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok antara lain penegakan Perda; penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum; serta perlindungan masyarakat.

RKT Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 dan Anggaran Perubahan Tahun 2019, sehingga dilakukan penyesuaian pada pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka mewujudkan Kota Depok yang Unggul, Nyaman, dan Religius.

Secara substantif RKT Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok merupakan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Satuan Pamong Praja Kota Depok Tahun 2016-2021. RKT ini juga merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok pada akhir tahun anggaran 2019 perubahan.

Kami menyadari bahwa penyusunan RKT Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Tahun 2019 perubahan ini belum sepenuhnya sempurna, karena itu saran konstruktif dibutuhkan.

Depok, 03 Oktober 2019

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Depok**

Ttd.

N Lienda Ratnanurdianny, SH.,M.Hum
NIP.197001271998032004

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Dasar Pemikiran	3
	1.4. Permasalahan yang dihadapi	3
	1.5. Prioritas Pembangunan	3
	1.6. Struktur Pemerintahan	4
BAB II	RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5
	2.1. Visi	5
	2.2. Misi	5
	2.3. Tujuan	5
	2.4. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	6
	2.5. Kebijakan dan Program	7
BAB III	RENCANA KINERJA TAHUN 2019 PERUBAHAN	8
	3.1. Sasaran yang dipilih	8
	3.2. Indikator Kinerja Sasaran yang Terpilih	8
	3.3. Program yang terpilih	9
BAB IV	PENUTUP	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, selanjutnya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Selain itu, sebagai wahana proses yang akan memberikan prespektif mengenai apa yang ingin dihasilkan ke depan, memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan dan dapat digunakan untuk menyusun prioritas kegiatan yang akan dibiayai dari sumber daya yang terbatas.

Rencana Kinerja Tahunan bermanfaat untuk menghubungkan Renstra dengan perencanaan operasional yang lebih terinci, membantu pencapaian hasil pelaksanaan program, dapat menjadi suatu *performance agreement*, memudahkan proses pengukuran kinerja, membantu monitoring dan evaluasi kinerja, membantu menetapkan kinerja periode berikutnya, serta memudahkan penetapan spesifikasi pekerjaan atas dasar capaian kinerja

Dalam penyusunan suatu Rencana Kinerja Tahunan perlu terlebih dahulu ditentukan atau ditetapkan beberapa hal seperti :

1. Mempelajari sasaran berikut indikatornya yang ingin dicapai;
2. Menentukan program/ kegiatan dan mempertimbangkan tingkat kinerja yang dapat dicapai;
3. Mempertimbangkan kemampuan riil pengerahan sumber daya;
4. Menetapkan tingkat kinerja yang ingin dicapai dalam bentuk target;
5. Mengintegrasikan rencana kinerja dengan rencana kerja yang lebih operasional.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 tahun 2008 tentang RPJPD tahun 2006 – 2025.
8. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Tahun 2016 – 2021 (tanggal 29 Desember 2017).
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok.
10. Peraturan Walikota Depok Nomor 110 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

1.3 Dasar Pemikiran

Dasar pemikiran Penyusunan Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2019 Perubahan ini, adalah :

1. Sebagai dokumen kinerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok.
2. Sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok sesuai Program dan Kegiatan.
3. Memberikan gambaran terencana terhadap sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok.

1.4. Permasalahan yang Dihadapi

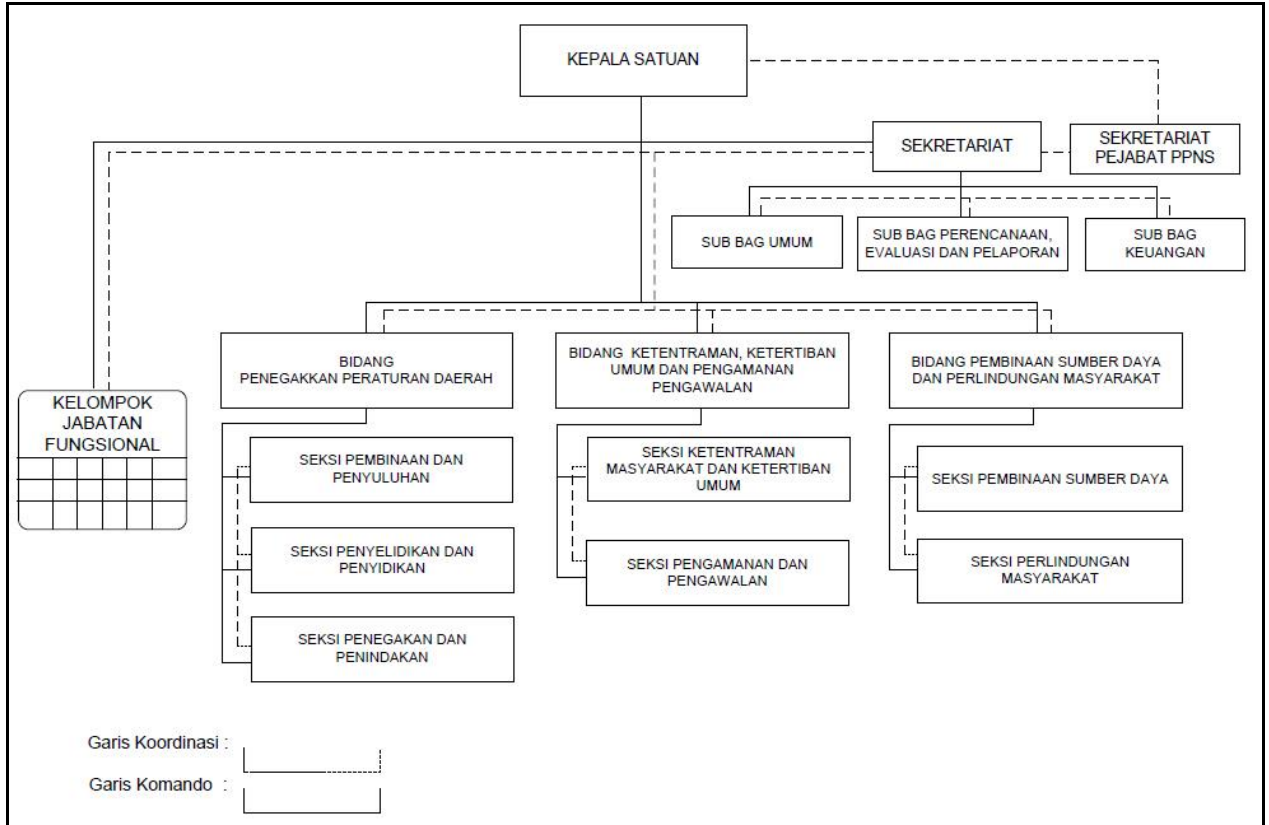
- a. Lemahnya tingkat koordinasi dan kolaborasi antar Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja ditandai dengan belum maksimalnya Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) pada Dinas pengampu Perda;
- b. Masih ditemui pelanggaran-pelanggaran yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Kurangnya sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Pembinaan dan pengawasan implementasi Perda Kota Depok yang belum maksimal;
- f. Sejumlah Perda dalam ketentuan pidananya mencantumkan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, sehingga dalam pemberkasannya membutuhkan waktu yang relatif lama.

1.5. Prioritas Pembangunan

Mendukung Misi Kota Depok yang ke-1 (satu) yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan, maka Satuan Polisi Pamong Praja menyusun Rencana Kerja Tahunan Tahun 2019 ke dalam 6 (enam) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan.

1.6. Struktur Pemerintahan

**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DEPOK**



BAB II

RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.1. Visi Satuan Polisi Pamong Praja

Visi Satuan Polisi Pamong Praja adalah Terwujudnya “Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius.”

2.2 Misi Satuan Polisi Pamong Praja

Sebagai penjabaran visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok di atas disusunlah misi pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok 2016-2021 yang telah dilakukan penyesuaian dengan Penyusunan RPMJD Perubahan Tahun 2016-2021; sehingga Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok masuk pada Misi Ke-1 RPJMD Perubahan Tahun 2016-2021, yakni “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan.”

2.3. Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan pada misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Tahun 2016–2021, sebagai berikut :

MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan.

Tujuan dari MISI I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Ketertiban Umum.

2.4. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran merupakan tolak ukur keberhasilan misi yang dijalankan dalam mencapai tujuan. Berikut ini sasaran pada misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Tahun 2016-2021 :

MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan.

Tujuan dari MISI I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Ketertiban Umum

Sasaran dari tujuan MISI I, dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik;

Indikator Kinerja Sasaran :

1. Predikat SAKIP Satpol PP.
2. Persentase Aset Satpol PP kondisi baik.
3. Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP.

2. Meningkatnya Ketertiban Umum

Indikator Kinerja Sasaran :

1. Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal.
2. Persentase Kawasan Rawan Trantibum yang Tertib.
3. Cakupan Rasio Petugas Linmas.

3. Meningkatnya Ketentraman Masyarakat

Indikator Kinerja Sasaran :

1. Persentase Mitra Kerja Satpol PP yang aktif.
2. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat.

2.5 Kebijakan dan Program

Untuk mencapai Sasaran diperlukan suatu kebijakan dan program. Berikut ini adalah Kebijakan dan Program untuk mencapai sasaran dari setiap misi Satuan Polisi Pamong Praja.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Ketertiban Umum	1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	1. Predikat SAKIP Satpol PP	1. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja, Keuangan. 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Peningkatan Administrasi Perkantoran 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat. 6. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan.
		2. Persentase Aset Satpol PP kondisi baik	
		3. Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP	
	2. Meningkatnya Ketertiban Umum	4. Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal	
		5. Persentase Kawasan Rawan Trantibum yang Tertib	
	3. Meningkatnya Ketentraman Masyarakat	6. Cakupan Rasio Petugas Linmas	
7. Persentase Mitra Kerja Satpol PP yang aktif			
	8. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat		

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUN 2019 PERUBAHAN

3.1 Sasaran Yang Terpilih

Sasaran yang terpilih di tahun 2019 perubahan ini adalah sebanyak 3 (tiga) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik.
2. Meningkatnya Ketertiban Umum
3. Meningkatnya Ketentraman Masyarakat

Sasaran ini dipergunakan untuk mencapai tujuan dari misi Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2018, sehingga apa yang direncanakan dalam Rencana Kinerja Tahunan dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

3.2 Indikator Kinerja Sasaran Yang Terpilih

Indikator Kinerja dari sasaran yang terpilih pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

SASARAN TERPILIH	INDIKATOR KINERJA SASARAN TERPILIH
1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	1. Predikat SAKIP Satpol PP
	2. Persentase Aset Satpol PP kondisi baik
	3. Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP

SASARAN TERPILIH	INDIKATOR KINERJA SASARAN TERPILIH
2. Meningkatnya Ketertiban Umum	4. Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal
	5. Persentase Kawasan Rawan Trantibum yang Tertib
	6. Cakupan Rasio Petugas Linmas
3. Meningkatnya Ketentraman Masyarakat	7. Persentase Mitra Kerja Satpol PP yang aktif
	8. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat

3.3 Program Yang Terpilih

Jumlah program pada tahun 2019 perubahan sebanyak 6 (enam) program yang didukung 41 (empat puluh satu) kegiatan, sehingga total pagu indikatifnya **Rp. 20.130.720.300,00**. Ke 6 (enam) Program tersebut antara lain :

1. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja, Keuangan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran.
4. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan.
6. Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat.

Berikut ini adalah tabel daftar program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2019 Perubahan :

**Daftar Program dan Kegiatan Berdasarkan DPA Perubahan
Tahun Anggaran 2019**

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Jumlah			Lokasi	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang		
1.01.05.	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang : KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
				19,234,632,200.00	20,130,720,300.00	896,088,100.00		
1	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	658,466,500.00	1,003,084,000.00	344,617,500.00	Kota Depok	
	1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK	25 jenis	80,150,000.00	80,150,000.00	-	Kota Depok
	2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	15 jenis	64,910,000.00	64,910,000.00	-	Kota Depok
	3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16 Jenis	19,988,000.00	64,878,000.00	44,890,000.00	Kota Depok
	4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	20 Jenis	20,000,000.00	20,000,000.00	-	Kota Depok
	5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	3 jenis (makan minum rapat, Tamu, Pegawai) selama 12 bulan	199,919,500.00	399,662,000.00	199,742,500.00	Kota Depok
	6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah	40 OH Dalam Daerah 412 OH Luar Daerah	273,499,000.00	373,484,000.00	99,985,000.00	Kota Depok
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	1,513,277,000.00	1,912,929,400.00	399,652,400.00	Kota Depok	
	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	45 Kendaraan	900,000,000.00	1,299,652,400.00	399,652,400.00	Kota Depok
	8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	7 Jenis (repiter, AC, Komputer, Printer, Jaringan Internet, HT, Elektronik lainnya)	52,180,000.00	52,180,000.00	-	Kota Depok
	9	Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian PDH	100 stel	144,400,000.00	144,400,000.00	-	Kota Depok

Rencana Kerja Tahunan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok
Tahun Anggaran 2019 Perubahan

	10	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Jenis	226,947,000.00	226,947,000.00	-	Kota Depok
	11	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas lapangan	100 stel dan Sepatu PDL	169,800,000.00	169,800,000.00	-	Kota Depok
	12	Pengadaan Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu	15 stel	19,950,000.00	19,950,000.00	-	Kota Depok
3		Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi	45%	325,441,000.00	325,441,000.00	-	Kota Depok
	13	Bimtek Satpol PP dan Pelatihan (Satgas Satpol PP)	Jumlah Peserta Pelatihan	60 Org dan 150 Org	325,441,000.00	325,441,000.00	-	Kota Depok
4		Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	BB	40,686,000.00	40,686,000.00	-	Kota Depok
	14	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	5 Jenis (Lap Kinerja dan Keuangan 12 dok, 1 Dok LAKIP, 1 dok/data LPPD, 4 lap Triwulan, 2 Lap Semesteran)	40,686,000.00	40,686,000.00	-	Kota Depok
5		Program Peningkatan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal; Cakupan Rasio Petugas Linmas	81%; 0,22%	16,633,542,800.00	16,785,361,000.00	151,818,200.00	Kota Depok
	15	Gelar Pasukan Satpol PP dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan TRANTIBUM	Jenis Gelar Pasukan	3 jenis (tingkat kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional)	102,124,800.00	102,124,800.00	-	Kota Depok
	16	Penertiban PKL	Jumlah titik lokasi PKL yang ditertibkan	50 titik	346,044,800.00	545,956,800.00	199,912,000.00	Kota Depok
	17	Penertiban Perizinan	Jenis Perizinan yang ditertibkan	2 jenis (100 IMB, 250 Perizinan lainnya, Reklame dll)	213,324,900.00	213,324,900.00	-	Kota Depok
	18	Penertiban Bangunan Liar di Lahan Fasos Fasum Milik Pemerintah Kota Depok	Jumlah titik lahan/lokasi Fasos Fasum yang ditertibkan	20 lokasi Fasos Fasum	477,040,000.00	477,040,000.00	-	Kota Depok

Rencana Kerja Tahunan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok
Tahun Anggaran 2019 Perubahan

19	Penertiban PSK, Anjal, dan Gepeng	Jumlah titik	11 titik	243,993,900.00	243,993,900.00	-	Kota Depok
20	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban	Jumlah Satgas Pol PP	212 orang	10,548,837,000.00	10,840,032,000.00	291,195,000.00	Kota Depok
21	Penjagaan/Pengamanan dan Pengawasan Lingkup Pemerintah Kota Depok	Jenis Penjagaan/ Pengamanan	5 jenis Pamwal (Pamwal Walikota dan Wakil/Pejabat + Tamu Penting, Sidang Paripurna, Unras/Demo, Hari Nasional dan Keagamaan, Hari Olahraga)	322,774,000.00	322,774,000.00	-	
22	Pengamanan Hari Raya	Jumlah Pengamanan Hari Raya	2 momentum (Idul Fitri dan Natal)	106,390,000.00	106,390,000.00	-	Kota Depok
23	Penertiban dan Monitoring Peredaran Minuman Beralkohol	Jumlah Penertiban dan Monitoring	32 kali	148,649,800.00	148,649,800.00	-	Kota Depok
24	Pengawasan dan Pemetaan titik/lokasi rawan Tranmastibum	Jumlah titik/lokasi	300 titik	188,570,000.00	673,740,000.00	485,170,000.00	Kota Depok
25	Konsolidasi Satpol PP dengan Instansi Terkait dalam Rangka Pemeliharaan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan	50 Konsolidasi	254,985,000.00	254,985,000.00	-	Kota Depok
26	Monitoring dan Evaluasi Pra-Pasca Penegakan Perda	Jumlah Monitoring dan Evaluasi	72 kali	134,534,000.00	134,534,000.00	-	Kota Depok
27	Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum	Jumlah Keluarahan, Jumlah Buku	20 Kelurahan : 1000 Buku	216,749,900.00	216,749,900.00	-	Kota Depok
28	Pengadaan Papan Larangan dan Segel	Jumlah Papan larangan/segel	70 papan segel sedang, 30 papan segel kecil	211,480,000.00	211,480,000.00	-	Kota Depok
29	Penertiban dan Operasi Penegakan Perda Tentang Ketertiban Umum (Tipiring)	Jumlah Kegiatan Tipiring; Jumlah pelanggar Perda yang di sidang Tipiring-kan	24 kali; 120 orang	193,970,000.00	393,874,000.00	199,904,000.00	Kota Depok
30	Pengawasan dan Penertiban Pelajar	Jumlah Pengawasan dan Penertiban Pelajar	24 kali	71,754,900.00	71,754,900.00	-	Kota Depok
31	Penertiban dan Operasi Penegakan Perda Tentang Ketertiban Umum (Penyegelan)	Jumlah Lokasi (bangunan) yang disegel	30 bangunan	78,900,000.00	78,900,000.00	-	Kota Depok

Rencana Kerja Tahunan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok
Tahun Anggaran 2019 Perubahan

	32	Penertiban dan Operasi Penegakan Perda (Pemusnahan Barang Bukti)	Jumlah Minuman yang beralkohol yang dimusnahkan	1157 buah (2 kali kegiatan)	68,174,000.00	68,174,000.00	-	Kota Depok
	33	Pemantauan Lokasi Rawan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah lokasi rawan gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan	189 Lokasi	303,300,000.00	303,300,000.00	-	
	34	Pengawasan dan Penertiban Kawasan Tanpa Rokok	Jumlah pengawasan dan penertiban di 7 kawasan tanpa rokok	12 kali	122,574,900.00	122,574,900.00	-	
	35	Penertiban dan pembongkaran menara telekomunikasi tidak berizin	Jumlah titik lokasi (Menara) tidak berizin	20 menara	598,839,900.00	43,970,000.00	(554,869,900.00)	
	36	Penertiban dan pembongkaran bangunan tidak berizin	Jumlah bangunan	100 bangunan	871,640,000.00	44,047,100.00	(827,592,900.00)	
	37	Pembinaan dan Pelatihan Linmas	Jumlah Anggota Linmas	126 Orang	326,015,000.00	326,015,000.00	-	
	38	Pengamanan Rangkaian Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif Tahun 2019	Jumlah Pelaksanaan Pengamanan	2 putaran pilpres dan 1 putaran pileg	482,876,000.00	482,876,000.00	-	
	39	Perbantuan Pengamanan Wilayah untuk Linmas Kota Depok dalam Kegiatan Pilpres dan Pileg Tahun 2019 (Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA 2019)	Jumlah Pelaksanaan Pengamanan	1 Putaran Pilpres dan 1 Putaran Pileg		208,500,000.00	208,500,000.00	
	40	Pembentukan Sistem E-Patrol	Jumlah Sistem	1 Aplikasi Sistem		149,600,000.00	149,600,000.00	
6		Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	63,218,900.00	63,218,900.00	-	
	41	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen Renja dan 90 peserta Forum OPD	63,218,900.00	63,218,900.00	-	
		TOTAL ANGGARAN 2019			19,234,632,200.00	20,130,720,300.00	896,088,100.00	

Rencana Kerja Tahunan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok
Tahun Anggaran 2019 Perubahan

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman semua jajaran yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun anggaran 2019 perubahan.

Rencana Kinerja Tahunan merupakan tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan kinerja dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok pada tahun 2019. Maka perlu dicermati indikator kinerja dan target kinerja dalam hal pencapaiannya.

Dengan demikian kerjasama dan kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok dengan Perangkat Daerah sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan Kota Depok yang Unggul, Nyaman, dan Religius.

Depok, 03 Oktober 2019

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Depok**

Ttd.

N Lienda Ratnanurdianny, SH.,M.Hum

NIP.197001271998032004